

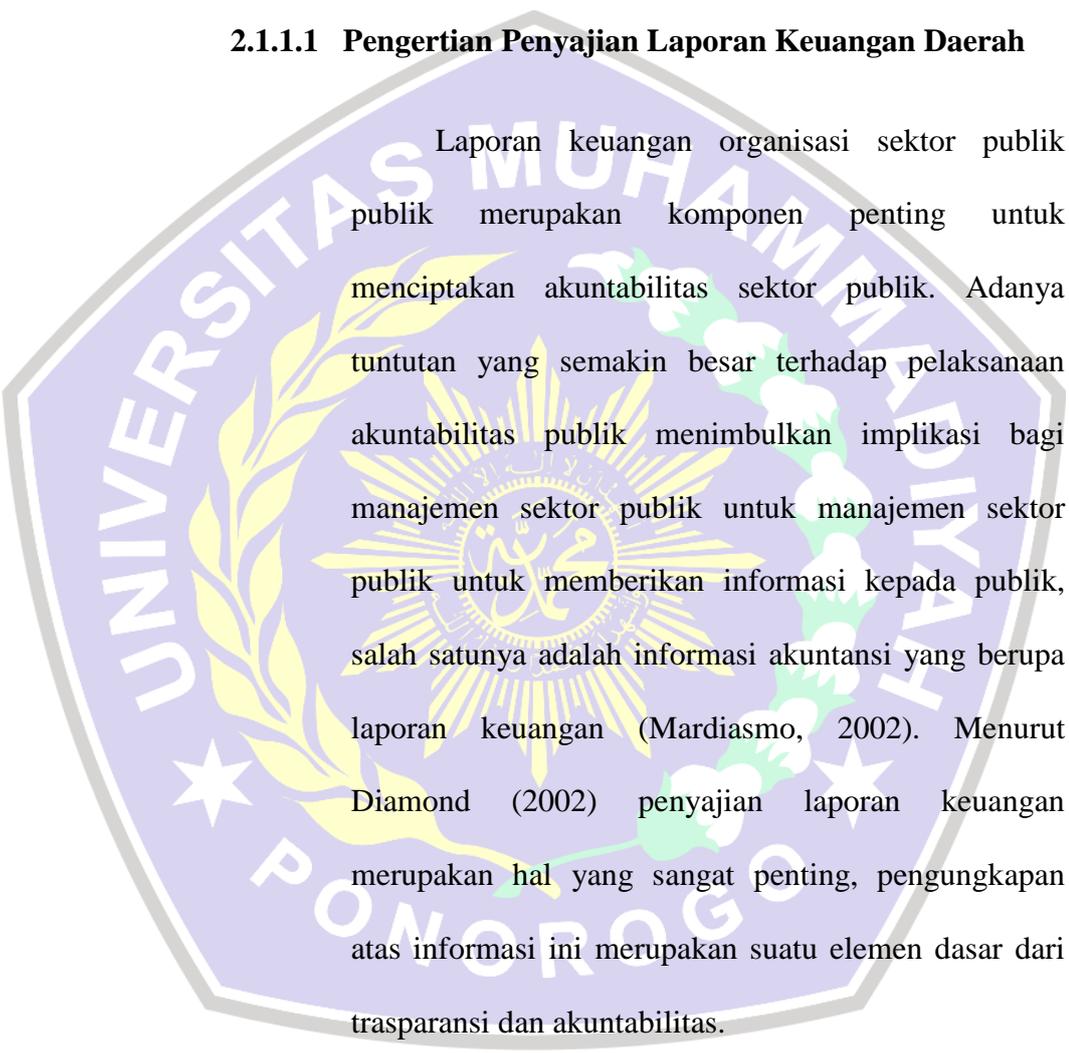
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan Daerah



Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Menurut Diamond (2002) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti dan Aida 2012). Sedangkan menurut Halim (2009:20) menyatakan tujuan pelaporan keuangan daerah adalah menyajikan laporan tentang;

1. Posisi keuangan

Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu (contohnya akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun).

Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

2. Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisari, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung

oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

3. Arus kas

Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

4. Kinerja pelaporan keuangan

Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya meliputi:

a. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari :

1) Aset

Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat memperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang menyelesaikannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut

(Riyanti 2017):

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/ daerah.

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara daerah.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran., neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah informasi posisi keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.

2.1.1.3. Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Menurut Diamond, (2002) Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan hutang yang mereka kelola.
- b) Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban

d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

Menurut Fahmi (2015:5) yang menyatakan bahwa “Dengan adanya laporan laporan keuangan yang disediakan manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan mendatang”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan atau instansi dimasa yang akan datang

2.1.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. relevan

Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan memiliki unsur berikut:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

b. Manfaat Prediktif (*prediktive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timelinesa*)

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki unsur berikut:

a. Dapat diuji kebenarannya (*variable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Penyajian secara wajar

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

Menurut Halim (2002) juga memaparkan terdapat empat karakteristik kualitatif pokok dari suatu laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Dapat Dipahami

Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunaannya. Dalam konteks ini, para pihak pengguna sendiri dituntut untuk memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai akuntansi dan informasi keuangan yang dikandungnya.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Penyajian informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat

memperbandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

2.1.1.5. Indikator Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Daerah

Indikator variabel penyajian laporan keuangan daerah yang dikembangkan oleh Sande

(2013) diukur dengan 8 indikator yaitu :

- 1) Laporan keuangan disusun secara lengkap.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).

2) Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

3) Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur.

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.

4) Laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh.

Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

5) Informasi yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dimuatkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

- 6) Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya.

Laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- 7) Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material.

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bebas dari kesalahan material.

- 8) Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan memenuhi kebutuhan untuk para pengguna laporan keuangan.

Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan periode sebelumnya.

2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Mulyana (2006), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Disisi lain, Rohman (2009), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintahan merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Sehingga dari kesimpulan diatas selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, sehingga perlu

diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

2.1.2.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Sedangkan menurut Budiriyanto (2013) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan. SIKD sebagai sebuah sistem juga demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

- 1) Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.

- 2) Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah
- 3) *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang mudah didapatkan akan memenuhi prinsip akuntabilitas.

2.1.2.3 Indikator Variabel Aksebilas Laporan Keuangan Daerah

Indikator variabel dari aksebilas laporan keuangan daerah yang dikembangkan oleh Wahdina (2015) terdiri dari:

- 1) Dipublikasikan secara luas dimedia masa.
Informasi keuangan daerah dipublikasikan secara luas melalui televisi, radio dan koran.
- 2) Pengguna potensial dapat memperoleh informasi dengan mudah.

Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.

3) Masyarakat dapat mengakses melalui internet.

Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan yang dibutuhkan melalui web resmi pemerintah.

2.1.3 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan menurut (Salomi 2015), Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002 : 20), adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas menurut Sitompul (2003), diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut LAN dan BPKP(2003) Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003).

Instrumen utama dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus

mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) bahwa Transparansi dan Akuntabilitas dapat diindikasikan dari hal berikut:

- a) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi stakeholders.
- b) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- c) Adanya mekanisme yang menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggung jawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- d) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

- e) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- f) Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- g) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.
- h) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan transparasi dan akuntabilitas keuangan daerah ini adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik tentang pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan jujur melalui media dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi pengelolaan keuangan.

2.1.3.2 Indikator Variabel Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Hanim (2009) indikator variabel dari Transparansi adalah :

1) Pengelolaan Keuangan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah diselenggarakan berdasarkan proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

2) Penyebar luasan laporan Keuangan telah disampaikan melalui media.

Informasi tentang laporan keuangan disampaikan melalui media televisi, radio dan koran.

3) Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan.

Terdapat tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya dan kelengkapan informasi berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.

4) Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai.

Ketersediaan system informasi akan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

- 5) Penyampaian Laporan Keuangan telah melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah disampaikan melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah agar para pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah mendapatkan informasi keuangan.

Indikator variabel Akuntabilitas yang dikembangkan oleh Sande (2015) sebagai berikut ini:

- 1) Penyusunan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan kinerja.

Penyusunan anggaran dengan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

- 2) Penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rancangan Anggaran pendapatan daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

- 3) Jika ada perubahan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

- 4) Pendapatan Daerah diserahkan tepat waktu.

Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 5) Pelaporan keuangan dibuat dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi a) Neraca, b) Laporan laba rugi komprehensif, c) Laporan perubahan ekuitas, d) Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus

dana, e) Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

6) Laporan keuangan disampaikan kepada BPK.

Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

7) Dilakukan financial audit terhadap laporan keuangan daerah.

Tujuan utama audit laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan yang jika tidak terdeteksi akan memberikan dampak materil pada kewajaran penyajian dan kesesuaian laporan keuangan dengan GAAP. Agar fisibel dan dapat dibenarkan secara ekonomis, proses audit bertujuan untuk mencapai tingkat kepastian yang wajar atas data yang ditelaah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Penelitian
1	Aprianti Dian dan Nursiam (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali	Hasil penelitian ini berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Iqbal, Anies Mustofa (2012)	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemasang	Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. serta penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Magdalena Maria Hesti Kurniawati (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan

		Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)	sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4	Azizah, Nur Junaidi, Achdiar dan Redy Setiawan (2014)	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah .
5	Sande Peggy (2013)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa: Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu disarankan bagi seluruh instansi

			pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.
--	--	--	---

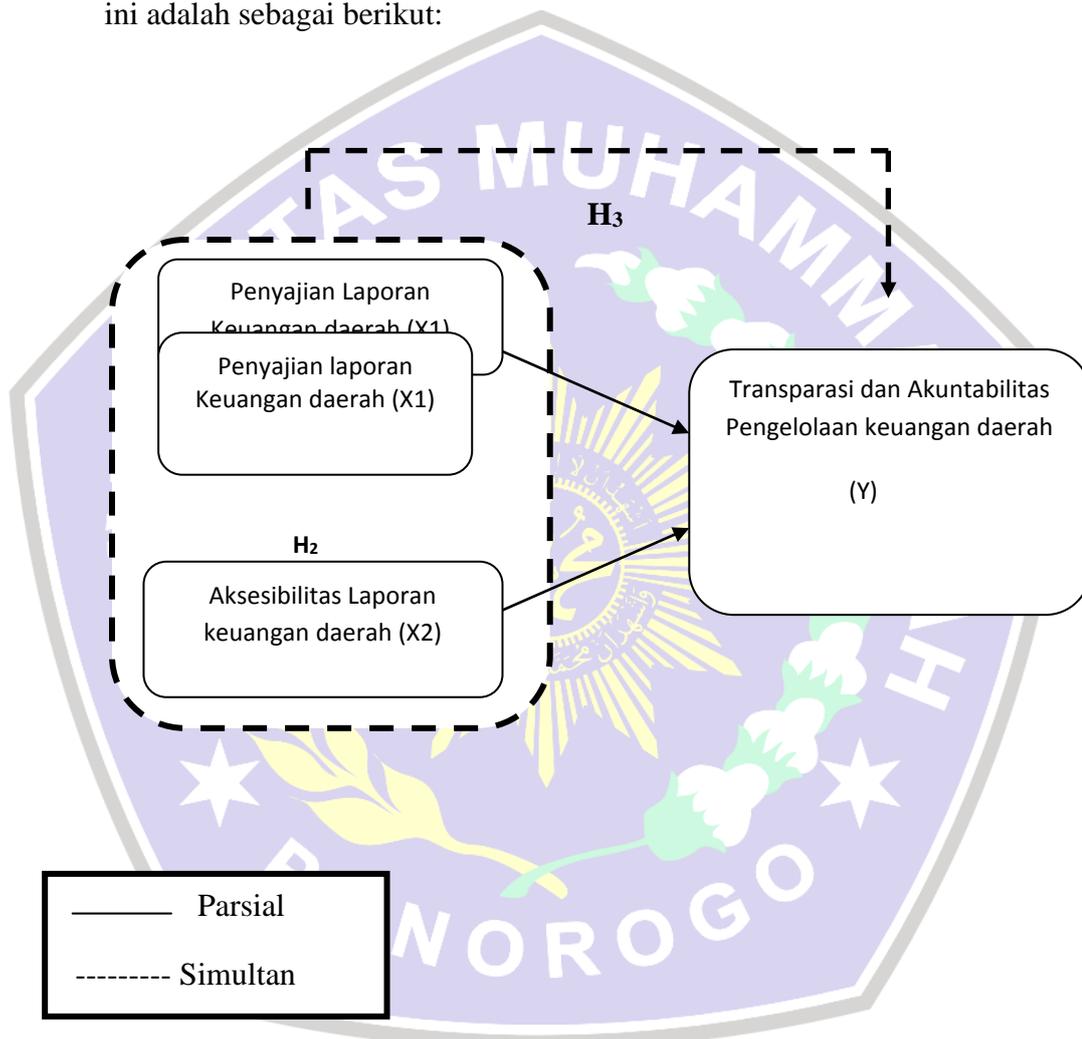
2.3 Kerangka Pemikiran

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tergantung pada penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Menurut hesti kurniawan(2016) semakin tinggi penyajian laporan keuangan maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sehingga pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diterima umum. Penyajian informasi yang transparan akan mewujudkan akuntabilitas publik karena penyajian informasi yang utuh dan transparan ini menggambarkan kinerja sesungguhnya dari suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dari entitas kepada publik.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga tergantung kepada aksesibilitas laporan keuangan daerah atau kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan tanpa memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan akan menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah tidak berjalan maksimal. Semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah maka semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercipta.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah proposisi atau dugaan belum terbukti bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian (Zikmud 1997).

2.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2009) Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Menurut Nordiawan (2010) penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian akuntansi yang transparan akan mewujudkan

akuntabilitas publik karena penyajian informasi yang utuh dan transparan akan menggambarkan kinerja sesungguhnya dari suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari entitas kepada publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Aliyah dan Nahar (2012), dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga dibuktikan hasil penelitian dari Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian keuangan daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₁ : Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Ha₁ : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas

Menurut Mulyana (2006), menyatakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Di sisi lain, Rohmann (2009), aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), aksesibilitas laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Menurut Kurniawati (2016), Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tergantung kepada aksesibilitas laporan keuangan daerah atau kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah tidak memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah. Akses laporan keuangan daerah yang semakin mudah maka akan semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercipta.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hehanussa (2015) yang mengungkapkan bahwa aksesibilitas

laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif, pemerintah dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangannya guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₂ : Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H_{a2} : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.3 Pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

Menurut Jones (1995) dalam Mulyana (2006), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi

juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Menurut Mahsun (2006) Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga dibuktikan dari hasil penelitian Hehanussa (2015) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀₃ : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H_{a3} : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

